



PENGADILAN AGAMA NEGARA

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen FM/AM/02/05		Tgl. Pembuatan 02/05/2018	Tgl. Revisi 02/01/2019	Tgl. Efektif 02/01/2019	
No.	Judul Dokumen	Pemrbit	Penanggung jawab		
1.	Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN INDE GEWESTEN BUTTEN JAVA EN MADURA (RBg)) (S. 1927-27)	Pemerintah RI	Kepaniteraan		
2.	Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering (S. 1847-52 jo. 1849-63))	Pemerintah RI	Kepaniteraan		
3.	Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, RO)	Pemerintah RI	Kepaniteraan		
4.	Kilab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)	Pemerintah RI	Kepaniteraan		
5.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	Pemerintah RI	Kepaniteraan		
6.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	Pemerintah RI	Kepaniteraan		
7.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	Pemerintah RI	Kepaniteraan		
8.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah	Pemerintah RI	Kepaniteraan		
9.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Pemerintah RI	Kepaniteraan		
10.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	Pemerintah RI	Kepaniteraan		
11.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang	Pemerintah RI	Kepaniteraan		



PENGADILAN AGAMA NEGARA

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/02/05	02/05/2018	02/01/2019	02/01/2019
12.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pemerintah RI	Kepaniteraan
13.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	Pemerintah RI	Kepaniteraan
14.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang	Pemerintah RI	Kepaniteraan
15.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pemerintah RI	Kepaniteraan
16.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Jin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	Pemerintah RI	Kepaniteraan
17.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Jin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	Pemerintah RI	Kepaniteraan
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	Pemerintah RI	Kepaniteraan
19.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pemerintah RI	Kepaniteraan
20.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Pemerintah RI	Kepaniteraan
21.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA NEGARA

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen FMAM/02/05	Tgl. Pembuatan 02/05/2018	Tgl. Revisi 02/01/2019	Tgl. Efektif 02/01/2019
Peradilan Di Bawahnya			
22.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
23.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
24.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Dalam Rangka Pemberkatan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
25.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
26.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
27.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
28.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadilan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
29.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA NEGARA

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/02/05	02/05/2018	02/01/2019	02/01/2019
Peradilan Di Bawahnya			
30.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
31.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
32.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia	Kepolisian RI	Kepaniteraan
33.	Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan	Pemerintah RI	Kepaniteraan
34.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	Pemerintah RI	Kepaniteraan
35.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Pemerintah RI	Kepaniteraan
36.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	Pemerintah RI	Kepaniteraan
37.	Peraturan Panglima TNI Nomor : PERPANG/1/VI/2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit	Tentara Nasional Indonesia	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA NEGARA

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen FM/AM/02/05	Tgl. Pembuatan 02/05/2018	Tgl. Revisi 02/01/2019	Tgl. Efektif 02/01/2019
38.	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang Kurang Biaya Perkaranya	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
39.	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1971 Tentang Ketua Majelis Hakim	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
40.	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
41.	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Biaya Administrasi	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
42.	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Selempat	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
43.	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
44.	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
45.	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
46.	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA NEGARA

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/02/05	02/05/2018	02/01/2019	02/01/2019
Peninjauan Kembali			
47.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
48.	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
49.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
50.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
51.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/095/X/2006	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
52.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
53.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
54.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
55.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
56.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2012	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA NEGARA

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FMAM/02/05	02/05/2018	02/01/2019	02/01/2019
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya			
57.	Surat Keputusan Panitia Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
58.	Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1012/SEK/HM.02.3/12/2017 Tentang Implementasi SIPP Versi 3.2.0 Di Empat Lingkungan Peradilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
59.	Surat Panitia Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2167/PAN/KU.00/E/2017 Tentang Pembayaran Biaya Perkara Kasasi / Peninjauan Kembali / HUM Menggunakan Rekening Virtual (Virtual Account)	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
60.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/DJA/SK/VI/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama	Ditjen Badilag MA RI	Kepaniteraan
61.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 Tentang Pedoman Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama	Ditjen Badilag MA RI	Kepaniteraan
62.	Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015 Tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama	Ditjen Badilag MA RI	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA NEGARA

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/02/05	02/05/2018	02/01/2019	02/01/2019
63.	Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan	Ditjen Badilag MA RI	Kepaniteraan
64.	Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0170/DJA/HK.02/1/2018 Tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	Ditjen Badilag MA RI	Kepaniteraan
65.	Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2017 a/DJA/OT.01.3/1/2015 Tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama	Ditjen Badilag MA RI	Kepaniteraan
66.	Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 0377 a/DJA/HM.00/2/2016 Tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama	Ditjen Badilag MA RI	Kepaniteraan
67.	Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4013/DJA/KU.00/1/1/2017 Tentang Tindak Lanjut Pemanfaatan Rekening Virtual Untuk Pembayaran Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Hak Uji Materiil	Ditjen Badilag MA RI	Kepaniteraan
68.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Komisi Informasi	Kepaniteraan
69.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Komisi Informasi	Kepaniteraan
70.	Kompilasi Hukum Islam	Pemerintah RI	Kepaniteraan
71.	Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 055/075/91/IIUm-TuPdt.	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA NEGARA

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen F/M/AM/02/05	Tgl. Pembuatan 02/05/2018	Tgl. Revisi 02/01/2019	Tgl. Efektif 02/01/2019
Tentang Petunjuk Bantuan Penyampai Panggilan Sidang, Pihak Yang Berrada di Luar Negeri			
72.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/63/PS.01/1/2018 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi dan Asisten Pembina Dan Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan Tahun 2018	PTA Kalimantan Selatan	Kepaniteraan
73.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : W15-A/105/Hk.05/2018/PA.Ktb Biaya Perkara Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara	PA Negara	Kepaniteraan
74.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor: W15-A/13/Kp.00.3/2018/PA.Ktb Tentang Penunjukan Petugas Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan Tahun 2018	PA Negara	Kepaniteraan
75.	Pengaturan Tentang Panjar Biaya Konsinyasi	PTA Sulawesi Selatan	Kepaniteraan
76.	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	Pemerintah RI	Sekretaris
77.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Pemerintah RI	Sekretaris
78.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Pemerintah RI	Sekretaris
79.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	Mahkamah Agung RI	Sekretaris
80.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	Sekretaris